

PROSPEK PASAR DAN SISTEM TATANIAGA TERNAK DAN DAGING SAPI DI NUSA TENGGARA BARAT

NYAK ILHAM

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor
Jalan Jend. A. Yani No. 70 Bogor*

ABSTRAK

NTB merupakan salah satu propinsi yang mencukupi kebutuhan daging nasional, walaupun kebutuhan daging sapi di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri juga terus cenderung meningkat. Permintaan lokal tersebut masih di bawah standar kebutuhan pola pangan harapan (PPH). Jika kesejahteraan masyarakat makin meningkat, diduga permintaan daging sapi di daerah ini juga akan meningkat. Studi ini bertujuan untuk (1) Menganalisis potensi pasar lokal daging sapi di NTB; (2) Menganalisis peran NTB di pasar sapi potong nasional; (3) Menganalisis sistem tataniaga ternak dan daging sapi di Propinsi NTB; dan (4) Mengkaji hubungan pasar ternak sapi lokal dengan pasar luar propinsi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan peternak, pedagang, dan pejabat terkait pada Bulan Agustus 2000. Data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Propinsi NTB dan Kota Mataram. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan teknik tabulasi silang sederhana. Hasil studi menunjukkan bahwa (1) Pasar lokal daging sapi di daerah ini masih prospektif untuk dikembangkan. (2) Peran NTB di pasar sapi potong nasional cenderung menurun, namun pangsaanya relatif stabil dan cenderung sedikit meningkat. (3) Sistem tataniaga ternak dan daging sapi di NTB sudah cukup efisien. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi yang diterima peternak mencapai 76% dari keseluruhan yang dibayar konsumen, sisanya diterima pejalag sapi dan pengecer daging di Kota Mataram. (4) Antara pasar sapi lokal dan pasar luar propinsi, terdapat hubungan dengan harga jual untuk perdagangan luar propinsi terdapat cenderung meningkatkan harga jual sapi di pasar lokal. Sebagai daerah sentra produsen, diperlukan upaya-upaya perbaikan sektor produksi untuk mempercepat peningkatan laju pertumbuhan populasi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing di pasar nasional.

Kata kunci: Ternak dan daging sapi, prospek, pemasaran, NTB

ABSTRACT

Nusa Tenggara Barat (NTB or the West Nusa Tenggara) Province is known as one of the centers of cattle production. The demand of local and national beef tend to increase. The local demand is noted still under the threshold of national standard of food sufficiency. Improvement on public welfare will subsequently increase demand of meat. This study aimed to analyze local markets potential of beef in NTB, to analyze the contribution of NTB at national market, to analyze trading systems of cattle and beef, to assess functional relationship between the local and inter regional markets. The study was carried out in August 2000, in west Nusa Tenggara Province, using a survey method. Primary data were gathered through interviews from a number of farmers and cattle traders based on structural questionnaire. Secondary data were collected from related institutions and a number of key people in NTB. Descriptive analyses were used to interpret the results. Results showed that (1) Local beef market in this area still prospective to improved. On the other hand, the involvement of NTB as a player in national market tend to be decreased. But the share quite constant and tend to be increased. (2) An efficient trading systems of cattle and beef were noticed, where farmers gained 76% of the total value paid by cattle trader and the rest was for wholesalers and retailers. (3) There was functional relationship of the local and national markets where demands for national market caused increasing the price of local market. To keep the role of this region as center of national cattle production, breakthrough efforts are needed to improve production sector by accelerating population growth and also by providing conducive circumstances in the policy to meet competitive advantage in national market.

Key words: Cattle and beef, prospect, marketing, NTB

PENDAHULUAN

Sudah sejak lama Propinsi NTB berperan sebagai daerah sentra produksi ternak sapi potong dengan tujuan pemasaran Jakarta dan Jawa Barat. Di pasar nasional, sapi dari NTB menghadapi saingan dari beberapa daerah sentra produsen lain di Indonesia. Di samping itu, pasar ternak dan daging sapi yang makin mengglobal, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah ternak dan daging sapi impor di pasar Jakarta dan Jawa Barat dengan harga yang cukup bersaing.

Masalah yang muncul adalah bahwa jika tidak ada upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi sejak dari kegiatan produksi sampai ke pemasaran, maka hal ini dapat menyebabkan daya saing sapi potong NTB menjadi menurun. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya akan menekan harga ternak di pasar lokal dan akan mengurangi aktivitas ekonomi usaha sapi potong yang selama ini menjadi salah satu andalan dan melibatkan banyak masyarakat NTB.

Di sisi lain sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan dan jumlah penduduk di NTB pada

umumnya dan Kota Mataram khususnya, maka permintaan daging sapi tersebut cenderung meningkat. Peningkatan konsumsi daging sapi yang terjadi saat ini ternyata masih di bawah standar Pola Pangan Harapan. Dengan demikian potensi pasar daging sapi lokal masih cukup prospektif untuk dikembangkan. Permasalahannya adalah apakah sistem tataniaga ternak dan daging sapi di Kota Mataram dan NTB pada umumnya sudah cukup efisien. Hal ini perlu dikaji agar meningkatnya volume perdagangan ternak dan daging sapi hendaknya juga turut meningkatkan kesejahteraan peternak sebagai produsen.

Dua pasar potensial, yaitu pasar lokal dan luar propinsi, memberi peluang dan alternatif bagi pedagang sapi. Pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh (1) pasar mana yang lebih menguntungkan; (2) bagaimana fasilitas dan regulasi yang diberikan pemerintah apakah memberikan insentif atau disinsentif bagi pedagang sapi; (3) apakah ada keterkaitan harga jual sapi untuk kebutuhan pasar lokal dengan pasar luar propinsi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk (1) Menganalisis potensi pasar lokal daging sapi di NTB; (2) Menganalisis peran NTB dalam pasar sapi potong nasional; (3) Menganalisis sistem tataniaga ternak dan daging sapi di Propinsi NTB; dan (4) Mengkaji hubungan pasar ternak sapi lokal dengan pasar luar propinsi. Dengan mengetahui informasi tersebut, diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Peternakan Propinsi dan Kabupaten di daerah ini serta instansi terkait dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan peternakan.

METODA PENELITIAN

Kerangka pemikiran

Perbedaan harga merupakan penyebab terjadinya perdagangan antar lokasi, yakni produk-produk cenderung mengalir dari daerah surplus ke daerah defisit, sampai perbedaan harga mendekati biaya tataniaga yang dikeluarkan (PURCELL, 1979; TOMEK and ROBINSON, 1990). Untuk mempertahankan perdagangan antar daerah, diupayakan agar margin tataniaga seminimal mungkin, sehingga mempunyai daya saing dengan produk sejenis di daerah tujuan pemasaran. Hal ini berarti bahwa sistem tataniaga sejak dari produsen hingga ke konsumen perlu dikoordinasikan agar tercapai tingkat efisiensi yang diharapkan (PURCELL, 1979). Aktivitas perdagangan banyak melibatkan pelaku ekonomi, baik swasta maupun pemerintah. Pemerintah dapat berperan meningkatkan efisiensi pemasaran antara lain dengan melakukan kebijakan yang kondusif.

Sebagai daerah produsen, peluang memasarkan produk dapat dilakukan untuk daerah setempat ataupun

luar daerah. Di Propinsi NTB komoditas sapi potong, selain untuk perdagangan antar pulau, berpeluang juga dipasarkan di dalam Propinsi NTB. Permasalahannya sapi potong yang diperdagangkan untuk luar propinsi adalah sapi-sapi jantan. Sementara itu, sapi tersebut dijual untuk kebutuhan lokal, maka harga daging sapi lokal akan cenderung meningkat, karena selama ini sapi yang dipotong untuk kebutuhan lokal pada umumnya betina. Depresiasi produk ini di satu sisi meningkatkan aktivitas ekonomi sapi potong dan menguntungkan konsumen. Namun demikian dalam jangka panjang akan merugikan Propinsi NTB karena dapat menguras sumberdaya sapi potong, akibat banyaknya pemotongan bertina produktif. Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah bersama pelaku ekonomi sapi potong lainnya untuk mencapai kondisi terbaik.

Cakupan, lokasi, dan waktu penelitian

Kajian ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang Identifikasi Tataniaga Ternak dan Daging Sapi Mendukung Pembangunan Rumah Potong Hewan dan Tataniaga Daging (ANONIMOUS, 2000). Isi makalah ini difokuskan pada hasil penelitian di Propinsi NTB, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilaksanakan pada Bulan Agustus 2000.

Jenis dan sumber data

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai kalangan, yakni pedagang ternak dan daging sapi, hotel dan restoran, Dinas Peternakan Propinsi NTB dan Kota Mataram, Persatuan Pedagang Hewan Indonesia (PEPEHANI) Propinsi NTB, dan jasa ekspedisi ternak sapi. Data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Propinsi NTB dan Dinas Peternakan Kota Mataram.

Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan teknik tabulasi silang dan diagram. Prospek pasar daging sapi lokal, dianalisis berdasarkan pendekatan tingkat konsumsi aktual dan potensial dengan formula sebagai berikut:

$$P_t = (JPT_t \times KPPH) - (JPT_t \times KAKT_t) \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- P_t = Prospek pasar pada tahun t (ton)
- JPT_t = Jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun t
- $KPPH$ = Tingkat konsumsi menurut Pola Pangan Harapan (kg/kapita/tahun)
- $KAKT_t$ = Tingkat konsumsi aktual pada tahun t (kg/kapita/tahun)

Prospek pasar nasional dianalisis dengan pendekatan pangsa ternak sapi potong asal NTB di pasar nasional. Sementara itu untuk mengetahui efisiensi sistem tataniaga ternak dan daging sapi dilakukan analisis marjin tataniaga, dengan formula yang diadopsi dari SAPTANA (1993), sebagai berikut:

$$M = \sum_{i=1}^m C_i + \sum_{j=1}^n \pi_j \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- M = Marjin tataniaga
- C_i = Biaya tataniaga i (i = 1, 2, 3, ...m)
- m = Jumlah jenis pembiayaan
- π_j = Keuntungan yang diperoleh lembaga tataniaga j (j = 1, 2, 3, ...n)
- n = Jumlah lembaga tataniaga yang terlibat dalam sistem tataniaga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prospek pasar lokal

Populasi dan produksi

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan populasi sapi di Propinsi Nusa Tenggara Barat hanya 0,61%/tahun (Tabel 1). Penggunaan ternak sapi di NTB antara lain untuk dipotong guna memenuhi konsumsi lokal dan untuk diperdagangkan ke luar propinsi sebagai ternak potong dan bibit. Dibandingkan dengan pertumbuhan populasi, rataan pertumbuhan produksi daging sapi yang berarti juga menggambarkan

pertumbuhan pemotongan sapi, angkanya jauh lebih besar, yaitu 14,4% per tahun (Tabel 2).

Kota Mataram sebagai Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat pendapatan yang relatif lebih tinggi dari kabupaten lain, membutuhkan daging sapi yang relatif lebih banyak. Untuk itu, daerah ini memproduksi daging sapi yang jauh lebih besar dari kabupaten lain, yaitu sekitar 35% dari total produksi Nusa Tenggara Barat. Untuk memproduksi daging sapi tersebut, Kota Mataram mempunyai fasilitas dua unit Rumah Potong Hewan RPH dengan kapasitas potong 42 ekor/hari. Akan tetapi tidak semua produksi daging sapi tersebut tercatat dengan baik. Diperkirakan pemotongan sapi yang tidak tercatat di Nusa Tenggara Barat mencapai 31,35% (Dinas Peternakan Propinsi NTB, 2000), sedangkan untuk Kota Mataram, menurut informasi pihak Dinas Peternakan Kota Mataram, angka tersebut sebesar 14,5%.

Tabel 1. Pertumbuhan populasi sapi potong di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 1995–1999

| Tahun | Jumlah (ekor) | Pertumbuhan (%/tahun) |
|--------|---------------|-----------------------|
| 1995 | 432.706 | - |
| 1996 | 450.142 | 4,03 |
| 1997 | 471.847 | 4,82 |
| 1998 | 429.847 | -8,90 |
| 1999 | 440.593 | -2,50 |
| Rataan | 445.027 | 0,61 |

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi NTB tahun 1997-2000 (diolah)

Tabel 2. Pertumbuhan produksi daging sapi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, menurut kabupaten, 1995-1999

| Kabupaten/Kota | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | R (%/th) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------|
| Lombok Barat | 503,6 | 611,3 | 654,0 | 828,6 | 917,2 (11,5) | 16,5 |
| Lombok Tengah | 374,6 | 471,9 | 409,0 | 507,8 | 855,1 (10,7) | 26,3 |
| Lombok Timur | 1073,8 | 1256,9 | 1357,6 | 1511,8 | 2137,6 (26,7) | 19,5 |
| Sumbawa | 387,4 | 458,2 | 489,4 | 510,3 | 725,3 (9,1) | 17,9 |
| Dompu | 99,5 | 116,0 | 96,3 | 80,0 | 140,3 (1,8) | 14,5 |
| Bima | 474,8 | 309,3 | 396,6 | 255,8 | 451,7 (5,7) | 8,6 |
| Kota Mataram | 1940,7 | 2492,3 | 2062,8 | 2062,8 | 2761,2 (34,5) | 11,5 |
| NTB | 4854,4 | 5715,9 | 5465,7 | 5715,1 | 7988,4 (100,0) | 14,4 |

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi NTB, 2000 (diolah)

Konsumsi daging sapi

Propinsi NTB memasukkan daging sapi beku dan olahan untuk memenuhi permintaan hotel berbintang, restoran internasional, dan Perusahaan Newmont Nusa Tenggara. Dengan mempertimbangkan adanya pemotongan tidak tercatat dan pemasukan daging sapi, maka perkiraan pertumbuhan konsumsi daging sapi di Propinsi NTB dan Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel 3.

Rataan konsumsi daging sapi selama enam tahun terakhir adalah sebesar 1,76 kg/kapita/tahun dan 6,54 kg/kapita/tahun masing-masing untuk Propinsi NTB dan Kota Mataram. Perbedaan ini mengindikasikan masih terjadi ketimpangan gizi yang cukup besar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pertumbuhan konsumsi daging sapi selama enam tahun terakhir di kedua wilayah tersebut berkisar 3–4% per tahun. Namun jika diperhatikan lebih seksama, maka sebenarnya hal itu cenderung fluktuatif. Krisis ekonomi pada medio 1997–1998 menyebabkan menurunnya konsumsi daging sapi. Akan tetapi pada 1999, dengan semakin pulihnya ekonomi, maka tingkat konsumsi meningkat kembali. Dua fenomena yakni, krisis ekonomi dan ketimpangan gizi di kota dan desa mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh cukup besar terhadap tingkat konsumsi daging sapi.

Salah satu hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Pola Pangan Harapan (PPH), disebutkan bahwa untuk mencukupi protein asal ternak sebanyak 6 gram/kapita/hari, harus tersedia produk ternak setara dengan konsumsi protein yang berasal dari 3,87 gram daging; 1,54 gram telur; dan 0,59 gram susu per kapita per hari (SOEDJANA *et al.*, 1998). Komposisi tersebut

setara dengan 10,1 kg daging; 4,7 kg telur; dan 6,1 kg susu per kapita per tahun.

Sungguhpun demikian untuk memperkirakan komposisi masing-masing jenis daging, diperlukan data pangsa konsumsi yang aktual di masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Propinsi NTB (2000) konsumsi daging sapi di Propinsi NTB dan Kota Mataram, masing masing sebesar 55,8 dan 67,7%. Sementara itu berdasarkan PPH, maka seharusnya konsumsi daging sapi di Propinsi NTB dan Kota Mataram seharusnya adalah sebesar 5,64 kg dan 6,84 kg per kapita per tahun.

Dengan menggunakan data penduduk pada pertengahan tahun, dapat diperkirakan neraca konsumsi potensial menurut PPH dan konsumsi aktual selama lima tahun terakhir pada kedua wilayah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Pertumbuhan konsumsi daging sapi di Propinsi NTB dan Kota Mataram 1994–1999

| Tahun | (Kg/kapita/tahun) | |
|-------------|-------------------|--------------|
| | Propinsi NTB | Kota Mataram |
| 1994 | 2,15 | 6,71 |
| 1995 | 1,44 | 6,23 |
| 1996 | 1,62 | 7,28 |
| 1997 | 1,58 | 5,86 |
| 1998 | 1,57 | 5,59 |
| 1999 | 2,21 | 7,54 |
| Rataan | 1,76 | 6,54 |
| R (%/tahun) | 3,44 | 4,09 |

Sumber: ANONIMOUS, 2000

Tabel 4. Neraca konsumsi daging sapi menurut PPH dan konsumsi aktual di Propinsi NTB dan Kota Mataram, 1995-1999

| Tahun | Penduduk per tengahan tahun (jiwa) | Kebutuhan menurut PPH (ton) | Konsumsi aktual (ton) | Neraca (ton) |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Propinsi NTB: | | | | |
| 1995 | 3 468 368 | 19 562 | 4 994 | (14 568) |
| 1996 | 3 658 950 | 20 636 | 5 927 | (14 709) |
| 1997 | 3 733 650 | 21 058 | 5 899 | (15 159) |
| 1998 | 3 819 550 | 21 542 | 5 997 | (15 545) |
| 1999 | 3 886 700 | 21 921 | 8 590 | (13 331) |
| R (%/th) | 2,9 | 2,9 | 15,8 | - 1,9 |
| Kota Mataram: | | | | |
| 1995 | 279 278 | 1 910 | 1 740 | (170) |
| 1996 | 306 883 | 2 099 | 2 234 | 135 |
| 1997 | 315 800 | 2 160 | 1 851 | (309) |
| 1998 | 325 800 | 2 228 | 1 821 | (407) |
| 1999 | 333 450 | 2 281 | 2 514 | 233 |
| R (%/th) | 4,6 | 4,6 | 11,9 | - |

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi NTB, berbagai terbitan (diolah)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa secara menyeluruh masyarakat Propinsi NTB tingkat konsumsi daging sapi masih di bawah PPH. Angka dalam kurung dalam kolom neraca konsumsi mengindikasikan prospek pasar lokal yang cukup potensial.

Laju pertumbuhan konsumsi aktual di Propinsi NTB dan Kota Mataram masing-masing adalah sebesar 15,8 dan 11,9%/tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduknya, yang menunjukkan bahwa ada faktor lain yang juga menentukan tingkat konsumsi, antara lain yang sangat berpengaruh adalah tingkat pendapatan. Oleh karena itu dengan makin membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan kecenderungan penghayatan konsumsi pasca krisis ekonomi (Tabel 3) maka pasar lokal akan terus ditantang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Masalah yang ada adalah bahwa laju peningkatan populasi tidak seimbang dengan laju pemotongan dan perdagangan ke luar propinsi. Hal ini antara lain disebabkan pola pemeliharaan yang secara umum masih secara tradisional, yakni sapi dipelihara di padang penggembalaan dengan mengandalkan pakan rumput alam. Hanya beberapa tempat di Pulau Lombok dan sebagian kecil daerah di Pulau Sumbawa yang sudah ada pemeliharaan sapi penggemukan intensif di dalam kandang. Keadaan ini belum banyak berubah dibandingkan dengan hasil penelitian ADNYANA *et al.*, (1997) di Propinsi NTB pada tahun 1995.

Lebih jauh lagi Dinas Peternakan Propinsi NTB menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan keragaan sapi Bali di NTB. Indikasinya adalah pada waktu yang lalu mudah diperoleh sapi dengan berat antara 400–450 kg, sedang saat ini sapi dengan berat 300 kg saja sudah mulai sulit diperoleh. Hal ini disebabkan salah satunya karena perdagangan antar propinsi sudah menguras ternak jantan yang besar, sehingga pejantan yang tinggal semakin kecil. Dengan manajemen pemeliharaan yang tidak teratur diduga, terutama di Sumbawa, terjadi *inbreeding*. Sementara itu, dengan fasilitas dan dana yang terbatas, serta pola pengusahaan ternak yang masih tradisional, penerapan teknologi inseminasi buatan (IB) berjalan lambat. Sementara itu data prestasi IB yang selama ini dihasilkanpun dikhawatirkan merupakan data di atas kertas saja yang diragukan ketepatannya. Sungguhpun demikian, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular secara rutin tetap dilakukan, namun tidak menjangkau semua daerah. Akan tetapi sampai saat ini upaya pengendalian tersebut dapat dikatakan efektif, karena tidak pernah terjadi eksplosif wabah penyakit menular.

Jika tidak ada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan populasi, tingginya tingkat pemotongan dan pengeluaran ternak antar propinsi dapat menyebabkan pengurasan sumberdaya ternak daerah

NTB. Padahal hingga kini sumberdaya alam untuk peternakan sapi baru dimanfaatkan 21,49% (Kanwil Deptan Propinsi NTB, 2000). Artinya daerah ini masih prospektif untuk dikembangkan sebagai sentra produksi sapi potong. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan antara lain pengembangan ternak melalui upaya-upaya perbaikan teknologi peternakan, pemberantasan penyakit, dan kemudahan-kemudahan pengembangan usaha diharapkan akan lebih memberi insentif bagi peternak untuk berproduksi, daripada hanya sekedar membatasi perdagangan antar propinsi yang cenderung memberikan disinsentif pada kegiatan ekonomi peternakan khususnya dan ekonomi regional umumnya.

Dalam rangka menghadapi masalah pembangunan peternakan, pihak Dinas Peternakan Propinsi berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten, saat ini sedang merubah paradigma pembangunan ternak di NTB dari yang semula meningkatkan populasi menjadi peningkatan produksi dan produktivitas. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan penerapan teknologi IB sejalan dengan kebijakan desentralisasi kegiatan IB;
2. Tidak hanya mengembangkan Sapi Bali seperti yang selama ini dilakukan, tetapi juga mengembangkan sapi-sapi persilangan menggunakan pejantan bangsa Simental, Limosin, Brahman, Angus, dan Brangus dan induk Sapi Bali dan PO dengan tujuan untuk usaha penggemukan untuk mencapai ADG (*average daily gain*) yang tinggi. Jika diperlukan memasukkan bibit atau sapi bakalan dari luar;
3. Meningkatkan pola pemeliharaan dari ekstensif tradisional menjadi semi intensif, melalui: (a) peningkatan kegiatan penyuluhan, (b) pembinaan padang penggembalaan, (c) memberikan paket-paket program pemerintah sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan syarat pemeliharaan semi intensif dan menggunakan teknologi inseminasi buatan atau program sapi penggemukan;
4. Melakukan sertifikasi bibit yang dihasilkan dengan demikian diperoleh harga jual yang lebih tinggi daripada untuk sapi potong. Selama ini tidak ada insentif bagi pembibit untuk berusaha, karena harga sapi bibit dan sapi potong cenderung sama. Di samping itu memberikan kemudahan-kemudahan bagi usaha pembibitan.
5. Mengajukan penggunaan tataruang khusus untuk peternakan agar menghindari konflik dalam pemanfaatan lahan, dan menunjang kepastian teknis, hukum, dan usaha melalui Peraturan Daerah. Pernah terdapat lahan padang penggembalaan umum yang sudah ditetapkan sebelumnya namun kemudian berubah menjadi lahan perkebunan.
6. Mengajak investor menanamkan modal dengan pengembangan pola kemitraan.

7. Mencegah pemotongan betina produktif, dengan cara membeli di pasar hewan dan di RPH untuk dikembangkan pada pusat pembibitan pemerintah daerah.

Prospek pasar luar propinsi

Perdagangan luar propinsi

Sama seperti sentra produsen lain, tujuan utama perdagangan sapi potong dari NTB adalah DKI dan Jawa Barat. Pada awalnya volume perdagangan luar propinsi ini diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan. Kemudian dengan semakin mengglobalnya perdagangan dunia, berdasarkan kesepakatan dengan IMF, sejak 1998 keluar Inpres RI No. 2 yang isinya mencabut kebijakan pembatasan dan pengaturan perdagangan. Namun demikian dengan alasan memperhatikan kelestarian sumberdaya ternak di daerah produsen, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Peternakan Propinsi NTB sejak tahun 2000 menetapkan pengendalian perdagangan luar propinsi dengan Surat Keputusan Nomor 1348a/XII/UT/1999.

Terjadinya pertumbuhan permintaan yang cepat (*over demand*) terhadap sapi NTB baik untuk kebutuhan lokal maupun luar propinsi menyebabkan ketidak seimbangan dalam pengadaannya. Akibatnya populasi sapi mengalami penurunan sedangkan produksi dagingnya meningkat. Menghadapi fenomena ini, pada tahun 2000 ditetapkan kemampuan pengeluaran ternak dari NTB masing-masing sebanyak 11.500 ekor sapi, 6.250 ekor kerbau, 3.400 ekor kuda, dan 14.000 ekor kambing. Diperkirakan pada tahun 2001 permintaan lokal dan luar propinsi masing-masing mencapai 50.000 ekor. Namun kebutuhan lokal lebih diprioritaskan untuk dipenuhi, sedangkan untuk luar propinsi kemampuannya hanya 10.000 ekor.

Sebelum tahun 2000, pertumbuhan volume perdagangan sapi potong luar propinsi selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,6% per tahun (Tabel 5). Jika diperhatikan lebih rinci, SK Dirjen mampu mengendalikan pengeluaran ternak dari NTB hingga 1997. Namun pencabutan peraturan tersebut berdasarkan Inpres RI No. 2, 1998 direspon positif oleh pasar, sehingga menaikkan volume perdagangan luar propinsi hingga 1999. Diharapkan adanya pembatasan perdagangan luar propinsi sejak 2000, akan menurunkan volume perdagangan luar propinsi kembali. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pengaturan berupa pembatasan perdagangan luar propinsi dapat menurunkan aktivitas ekonomi sapi potong di NTB.

Tabel 5 menunjukkan perbandingan antara penggunaan sapi potong untuk perdagangan luar propinsi dan pemotongan untuk konsumsi lokal.

Diduga angka yang sebenarnya masih lebih tinggi akibat pemotongan tidak tercatat dan penyelundupan ternak ke luar daerah. Informasi penting dari tabel ini adalah bahwa permintaan daging sapi lokal rata-rata lebih banyak dan cenderung meningkat, keadaan sebaliknya terjadi untuk perdagangan luar propinsi. Indikasi ini menunjukkan bahwa di tingkat pasar lokal pasar daging sapi di NTB cenderung semakin prospektif.

Tabel 5. Pertumbuhan perdagangan sapi luar propinsi dan pemotongan sapi tercatat di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 1995-1999

| Tahun | Pengeluaran | | Pemotongan tercatat |
|-----------|-------------|------------|---------------------|
| | Sapi potong | Sapi bibit | |
| 1995 | 40 027 | 440 | 26 451 |
| 1996 | 28 441 | 2 558 | 30 587 |
| 1997 | 20 433 | 1 600 | 32 366 |
| 1998 | 22705 | 0 | 33 845 |
| 1999 | 27 143 | 1 184 | 42 748 |
| Rataan | 27 744 | 1 156 | 33 199 |
| R (%/thn) | - 6,6 | - | 13,1 |

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi NTB, berbagai terbitan (diolah)

Berkaitan dengan kebijakan kuota perdagangan sapi luar propinsi, pihak Dinas Peternakan Propinsi menyadari bahwa hal itu sebenarnya merupakan distorsi pasar yang secara keseluruhan tidak menguntungkan. Sebab perdagangan luar propinsi berarti merupakan pemasukan bagi NTB. Semakin banyak ternak keluar semakin meningkat kegiatan ekonomi sehingga terjadi beragam efek yang juga akan meningkat. Hal ini telah disampaikan pada pihak Dinas Peternakan Kabupaten, namun kelihatannya pihak kabupaten belum siap untuk membuka pasar bebas tersebut, karena masih perlu mempertahankan populasi. Sebenarnya jumlah yang dikeluarkan tidak ada masalah, hanya harus memenuhi ketentuan berat badan minimal yang telah ada, sehingga nilai tambah usaha sapi potong tersebut dapat diperoleh peternak produsen.

Sementara itu, pedagang sapi luar propinsi merespon negatif kebijakan ini. Kebijakan kuota sebaiknya dihapuskan agar pengiriman ternak antar pulau dapat berjalan kontinu dengan tetap mempertahankan populasi ternak di NTB, yakni dengan mekanisme yang telah dimodifikasi dibandingkan kebijakan sebelumnya, yaitu dari penjatahan per periode, menjadi penjatahan berdasarkan ketersediaan ternak di pedagang dengan patokan kuota masing-masing kabupaten dan memungkinkan diberikan jatah kuota tambahan. Kebijakan ini diikuti dengan upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak, sehingga syarat berat

minimal yang ditetapkan dapat tercapai. Jika upaya itu tidak tercapai atau tercapai dalam jangka waktu yang lama, hal ini akan merugikan masyarakat secara menyeluruh karena prospek pasar tingkat nasional yang cukup baik tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah NTB. Kondisi yang demikian akan menyebabkan penawaran sapi di pasar lokal akan meningkat, sehingga harga sapi mengalami penurunan. Hal ini akan merangsang terjadinya penyelundupan sapi dan merugikan peternak.

Peran ternak sapi NTB di daerah sentra konsumen

Sentra konsumen daging sapi nasional adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dengan asumsi semua sapi yang diperdagangkan luar propinsi dari NTB ditujukan ke kedua daerah ini, maka peran NTB di pasar nasional dapat dilihat dari pangsa sapi yang diperdagangkan luar propinsi dengan jumlah ternak sapi potong yang masuk ke dua daerah ini. Gambaran jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah sapi yang masuk ke sentra konsumen sejak tahun 1995–1997 terus menurun, dan naik kembali pada 1998. Akan tetapi secara menyeluruh terjadi penurunan rata-rata 6,2% per tahun. Penurunan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) Meningkatnya volume daging sapi impor untuk pasar kedua wilayah ini, dan (2) Meningkatnya pasokan daging sapi eks impor yang diproduksi oleh *feedlotter* yang sebagian berlokasi di Jawa Barat. Diduga aspek daya beli tidak mempengaruhi hal ini, karena penurunan tersebut telah terjadi sebelum krisis ekonomi pada medio 1997 yang berdampak pada 1998. Peningkatan pemasukan ternak pada 1999, mengindikasikan bahwa penghapusan kuota perdagangan antar daerah secara nasional meningkatkan volume perdagangan sapi antar pulau.

Sejalan dengan menurunnya pemasukan sapi ke kedua wilayah sentra konsumen, pengiriman sapi potong dari NTB ke kedua wilayah tersebut juga mengalami penurunan rata-rata 6,6% per tahun, dengan data yang hampir sama. Akan tetapi peran NTB yang dapat dilihat dari pangsa pengiriman sapi asal NTB terhadap jumlah sapi yang masuk ke DKI dan Jabar masih mengalami peningkatan rata-rata 1,6% per tahun.

Implikasi terhadap kebijakan Otonomi Daerah antara lain bahwa daerah, khususnya kabupaten, berusaha menggali pendapatan asli daerah semaksimal mungkin, sehingga berdampak terhadap meningkatnya kutipan-kutipan yang dapat ditarik berupa retribusi dan sejenisnya pada kegiatan perdagangan sapi luar propinsi. Hal ini tentunya akan meningkatkan biaya tataniaga yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing produk di pasar konsumen. Akibatnya perdagangan sapi luar propinsi tidak memberikan insentif lagi bagi pedagang antar pulau, sehingga peran NTB di pasar konsumen dikhawatirkan semakin menurun.

Fasilitas pendukung perdagangan antar pulau

Angkutan ternak dari NTB menuju Jakarta dan Jawa Barat dilakukan melalui jalur laut sampai ke Pelabuhan Kali Mas Surabaya yang dilanjutkan dengan menggunakan truk atau kereta api menuju Jakarta dan sekitarnya. Tidak dilakukannya layanan langsung lewat laut ke Jakarta, disebabkan karena risiko menjadi lebih besar akibat ternak terlalu lama di kapal. Pelabuhan Lembar merupakan pintu keluar ternak sapi dari Pulau Lombok, sedangkan dari Pulau Sumbawa dapat melalui Pelabuhan Bima, Pelabuhan Kapo Dompu, dan Pelabuhan Tano.

Tabel 6. Pertumbuhan pangsa sapi potong asal NTB yang masuk ke sentra konsumen utama DKI Jakarta dan Jawa Barat, 1995–1999

| Tahun | Pemasukan sapi ke DKI dan Jabar (ekor) | Pengeluaran Sapi Potong dari NTB | |
|----------|---|----------------------------------|-----|
| | | (ekor) | (%) |
| 1995 | 674 746 | 40 027 | 5,9 |
| 1996 | 674 614 | 28 411 | 4,2 |
| 1997 | 554 650 | 20 433 | 3,7 |
| 1998 | 425 282 | 22 705 | 5,3 |
| 1999 | 494 685 | 27 143 | 5,5 |
| Rataan | 564 795 | 27 744 | 4,9 |
| R (%/th) | -6,2 | - 6,6 | 1,6 |

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi NTB, berbagai terbitan dan Direktorat Jenderal Peternakan Jakarta, 2000

Menurut informasi pihak Dinas Peternakan dan Pepehani Dompou, pengawasan perdagangan ternak ke luar propinsi, khususnya melalui wilayah Pulau Sumbawa sulit dilakukan karena masih sering terjadi pengeluaran ternak tidak melalui pelabuhan, melainkan melalui pesisir utara tanpa menggunakan darmaga dengan menggunakan kapal asal Banyuwangi dan Makassar yang berkapasitas 20 ekor sapi. Kegiatan ini bukan dilakukan oleh anggota Pepehani, tetapi pedagang luar daerah yang didukung pedagang setempat dan diduga ada kerjasama dengan pihak keamanan. Sayangnya, kejadian ini belum dapat diatasi.

Dalam pengiriman ternak kendala yang ada adalah fasilitas angkutan laut yang digunakan masih sangat sederhana, yaitu menggunakan kapal kayu. Tidak ada kapal angkutan khusus ternak, sehingga saat ini ternak dikirim menggunakan kapal barang bercampur dengan barang lainnya. Kapal barang tidak dilengkapi fasilitas angkutan ternak yang wajar, seperti: air, pakan, kandang sekak, dan fasilitas bongkar muat sapi. Walaupun demikian risiko kematian selama transportasi sangat kecil. Kalaupun terjadi risiko, ditanggung oleh pedagang ternak sebagai pengguna jasa.

Menurut informasi pihak Persatuan Pedagang Hewan (Pepehani) Propinsi NTB, dengan fasilitas yang ada, penyusutan berat badan ternak selama transportasi mencapai 7-10%. Awalnya frekuensi angkutan ternak ini ada secara reguler setiap hari. Akhir-akhir ini frekuensi tersebut menjadi berkurang, yaitu 1-2 kali dalam seminggu dan tidak reguler. Ketidakpastian ini menambah biaya karantina bagi pedagang dan penyusutan berat badan sapi mencapai lebih dari 12%. Artinya keuntungan yang diterima pedagang sapi antar pulau semakin kecil. Keadaan ini semakin mengurangi daya saing ternak sapi NTB di daerah sentra konsumen.

Agar daya saing sapi NTB menjadi meningkat, menurut pihak Pepehani beserta instansi terkait di NTB ada dua usulan untuk mengatasinya. Pertama, diharapkan tersedia kapal angkutan ternak dengan rancangan khusus yang beroperasi secara reguler, walaupun hal ini dapat menyebabkan biaya transportasi menjadi meningkat. Kedua, dibukanya jalur angkutan ternak melalui darat dan penyeberangan ferry yang selama ini tidak dapat melintasi Bali karena NTB masih merupakan daerah endemi penyakit SE dan Anthrax, terutama yang berasal dari Pulau Sumbawa. Untuk itu perlu ditinjau kembali kebijakan tersebut melalui upaya karantina yang disiplin dan pemberantasan penyakit melalui vaksinasi secara berkala di wilayah endemi.

Sistem tataniaga ternak dan daging sapi

Jalur tataniaga

Pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan tataniaga ternak dan daging sapi di NTB adalah peternak sapi, agen (pelele), pedagang pengumpul, pedagang atau pejagal sapi, pedagang sapi antar pulau, pengecer daging sapi, dan konsumen. Fasilitas yang berperan penting dalam aktivitas tersebut adalah: alat transportasi, pasar hewan, rumah potong hewan, dan pasar tradisional. Hingga saat studi ini dilakukan belum ada fasilitas penjualan daging sapi menggunakan *meatshop* dan pasar swalayan. Namun menurut informasi pada tahun 2001 sudah ada pasar swalayan yang menjual daging sapi di Kota Mataram NTB.

Aktivitas perdagangan ternak dan daging sapi sejak dari peternak hingga ke konsumen secara umum dapat digambarkan pada Diagram 1. Untuk wilayah Pulau Lombok, pada umumnya peternak menjual sapi ke pasar hewan, sedangkan di Pulau Sumbawa umumnya pedagang melalui agen (pelele) mendatangi peternak di rumahnya. Di pasar hewan terjadi interaksi antara peternak, agen, dan pedagang yang terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang/pejagal sapi, dan pedagang antar pulau. Setiap transaksi selalu melibatkan agen. Dalam beberapa kasus, pedagang pengumpul dapat bertransaksi langsung dengan peternak. Sebaliknya peternak dapat langsung ke pasar lewat pedagang pengumpul di rumahnya atau lewat pelele. Beberapa pejagal dapat membeli ternak langsung dari peternak. Dari setiap transaksi agen mendapat komisi dari kedua belah pihak atau satu diantaranya dengan kisaran antara Rp 5.000,- dan Rp 10.000,-/ekor sapi. Hubungan agen dengan pedagang, khususnya dengan pejagal sapi, relatif cukup baik, bahkan jika suatu transaksi pejagal memperoleh keuntungan yang lebih dari perkiraan, pejagal memberi komisi tambahan komisi pada agen pasca transaksi.

Hasil pengamatan langsung di Pasar Hewan Selagalas Kota Mataram, seperti pada umumnya di pasar hewan di daerah lain di Indonesia, jual beli dilakukan dengan perhitungan berat karkas yang dilakukan berdasarkan taksiran yang dalam bahasa setempat disebut *cawangan*. Jika terjadi keraguan dalam penaksiran antara peternak dengan pembeli, khususnya pejagal, dapat dilakukan penimbangan. Namun, selalu diciptakan suasana oleh para pedagang agar mereka saling percaya, sehingga penimbangan tersebut jarang dilakukan. Suasana seperti ini cenderung merugikan petani, sebaliknya pedagang/pejagal dan agen cenderung diuntungkan.

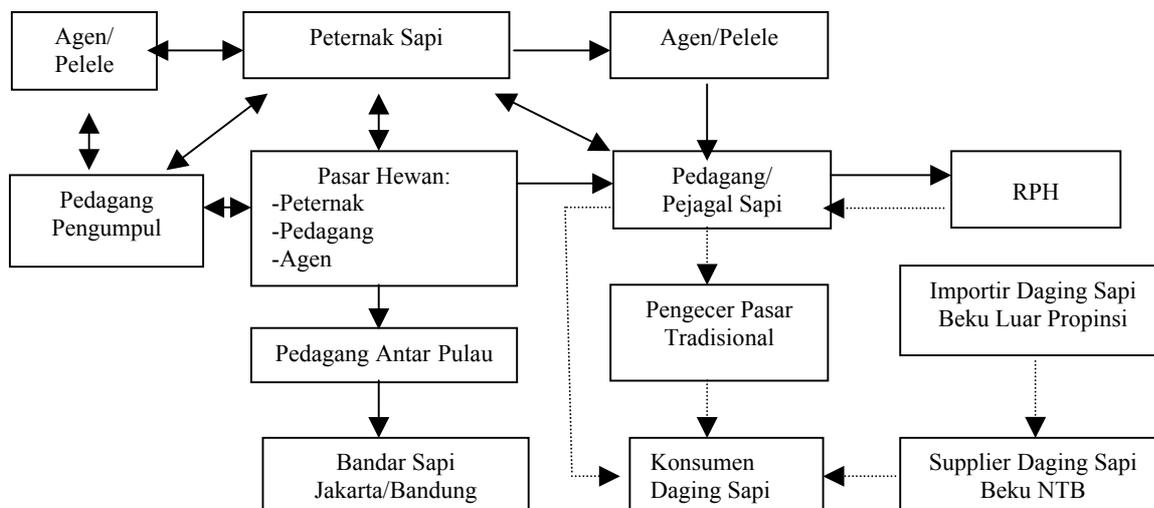


Diagram 1. Sistem Tataniaga Ternak dan Daging Sapi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2000

Keterangan: ————— Jalur perdagangan sapi
 Jalur perdagangan daging sapi

Tabel 7. Jumlah ternak sapi yang diperdagangkan di pasar hewan yang ada di Nusa Tenggara Barat, 1995–1999

| Tahun | Masuk pasar (ekor) | Laku | |
|---------------|--------------------|---------|-------|
| | | ekor | % |
| 1995 | 126 179 | 85 779 | 68 |
| 1996 | 191 089 | 120 217 | 63 |
| 1997 | 114 388 | 66 410 | 58 |
| 1998 | 98 269 | 48 971 | 50 |
| 1999 | 97 440 | 24 895 | 26 |
| Trend (%/thn) | -0,9 | -20,1 | -19,3 |

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi NTB, berbagai terbitan (diolah)

Khusus untuk sapi keperluan perdagangan luar propinsi, dilakukan penimbangan yang digunakan sebagai dasar penentuan harga sapi. Karena harga ditentukan berdasarkan berat hidup sapi, yang tingkatannya bervariasi. Semakin berat sapi maka semakin tinggi harga per kilogram berat hidupnya. Saat studi ini, variasi harga antara Rp. 8000,- s.d. Rp.10.000,- per kg berat hidup, sedangkan harga untuk pemotongan lokal selalu di bawah harga sapi untuk perdagangan luar propinsi, yaitu antara Rp 6000,- s.d. Rp 7000,- per kg. Perkembangan harga lokal ini mengacu pada harga di Jakarta dan Jawa Barat.

Keterkaitan harga perdagangan luar propinsi dengan pasar lokal tentunya menguntungkan bagi peternak sebagai produsen. Jika rintangan-rintangan

perdagangan diberlakukan dapat menyebabkan volume perdagangan luar propinsi daerah menurun. Akibatnya pasokan untuk sapi lokal meningkat. Keadaan ini akan menurunkan harga sapi lokal dan cenderung merugikan peternak. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan yang diambil hendaknya memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Apalagi bagi NTB, sapi potong merupakan komoditas yang sejak dulu perannya terhadap perekonomian daerah cukup berperan.

Pejagal sapi pada umumnya melakukan pemotongan sapi di RPH pemerintah, namun ada sebagian kecil yang memotong di rumah sendiri. Pada umumnya pejagal menjual daging sapi pada pengecer. Transaksi antar pejagal dan pengecer terjadi pada pagi sekitar jam 04.00 hingga 05.30 di RPH. Namun ada juga sebagian kecil pejagal melakukan kegiatan ganda, yaitu menjual ke pengecer daging sapi dan juga melakukan kegiatan pengeceran daging sapi. Pengecer menjual dagingnya di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Mataram.

Struktur pasar daging sapi di Kota Mataram cenderung mengarah pada pasar persaingan sempurna. Pada tiga pasar tradisional yang tergolong besar, yaitu Pasar Mandalika, Pasar Cakranegara, dan Pasar Kebonroek terdapat lebih dari 88 orang pengecer daging sapi. Pada pasar yang tergolong kecil, seperti pasar ACC Ampenan saja terdapat 10 pengecer. Dengan demikian, pembeli dapat memilih membeli di mana saja sesuai keinginannya.

Pada tingkat pejagal, pengecer juga mempunyai kesempatan untuk membeli pada beberapa pejagal yang

ada. Terdapat lebih 15 orang pejagal sapi di Kota Mataram. Dengan demikian pengecer dapat membeli kepada pejagal mana saja sesuai dengan keinginannya. Namun demikian cenderung ada hubungan baik antara keduanya sebagai pelanggan. Akan tetapi ada juga pengecer yang membeli dari pejagal yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan ketidak lancaran pembayaran pengecer ke pejagal. Jika hal ini terjadi pengecer yang bersangkutan berusaha membeli dari pejagal lain.

Analisis Marjin Tataniaga

Untuk mengetahui proporsi manfaat yang di terima dari setiap pelaku pasar dapat dilakukan dengan analisis marjin tataniaga. Untuk itu perlu diketahui volume pemasaran per satuan waktu dari komoditas yang dipasarkan, berupa ternak dan daging sapi. Sesuai dengan kapasitas rumah potong Majeluk, yaitu antara 25 dan 30 ekor per hari dan berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang/pejagal sapi dan pengecer daging sapi di Kota Mataram, omset perdagangan ternak dan daging sapi di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel 8.

Pedagang/pengecer sapi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu yang setiap harinya rata-rata memotong sapi sebanyak 7, 3, dan 1 ekor. Pada umumnya sapi yang dipotong adalah sapi Bali betina. Sementara itu untuk pengecer dikelompokkan berdasarkan omsetnya yaitu dari 19 kg per hari sampai 100 kg per hari. Data ini sesuai dengan data teknis yang digunakan pihak Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan asumsi rata-rata berat hidup seekor sapi potong 300 kg dengan komposisi karkas 50% dan komposisi daging sapi dari karkas 80%, maka omset penjualan daging sekitar diperkirakan 3600 kg per hari.

Pemotongan seekor sapi menghasilkan daging dan beberapa produk ikutannya. Selain harga daging, harga produk ikutan menentukan tingkat keuntungan seorang pedagang/pejagal sapi. Di Kota Mataram, hati sapi merupakan produk yang harganya paling tinggi, yaitu Rp. 27.000,-/kg. Namun demikian keuntungan terbesar masih diperoleh dari hasil penjualan daging, yaitu 56,2%. Rincian keuntungan dan harga tiap jenis produk sapi potong dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 8. Rataan omset perdagangan ternak dan daging sapi di Kota Mataram, 2000

| Kelas pedagang | Pejagal sapi | | | Pengecer daging sapi | | |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| | Omset (ekor/hari) | Pejagal (orang) | Potong (ekor) | Omset (kg/hari) | Pengecer (orang) | Daging (kg) |
| Tinggi | 7 | 1 | 7 | 100 | 5 | 500 |
| Menengah | 3 | 4 | 12 | 60 | 15 | 900 |
| Bawah | 1 | 11 | 11 | 19-35 | 68 | 2164 |
| Jumlah | - | 16 | 30 | - | 88 | 3564 |

Tabel 9. Harga daging sapi pada tingkat pedagang besar dan pengecer serta proporsi keuntungan tiap jenis produk di Kota Mataram NTB, 2000

| Jenis produk | Vol.(kg) | Harga (Rp/kg) | | Keuntungan pengecer | |
|------------------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| | | Pedagang besar | Pengecer | Rp | % |
| | | (Berat Hidup 250 kg-Sapi Bali) | | | |
| Daging (borongan) | 95 | 20.000,- | - | - | - |
| Daging Klas I (63%) | 60 | - | 22.000,- | 120.000,- | 56,2 |
| Daging Klas II (37%) | 35 | - | 20.000,- | 0,00 | 0,0 |
| Hati | 3 | 20.000,- | 27.000,- | 21.000,- | 9,8 |
| Jantung, ginjal, limpa | 2 | 20.000,- | 18.000,- | -4.000,- | -1,9 |
| Tulang | 8 | 7.000,- | 8.000,- | 8.000,- | 3,7 |
| Usus | 6 | 6.000,- | 7.000,- | 6.000,- | 2,8 |
| Babat | 6 | 6.000,- | 7.500,- | 9.000,- | 4,2 |
| Paru | 1,50 | 12.000,- | 14.000,- | 3.000,- | 1,4 |
| Buntut | 1,25 | 10.000,- | 12.000,- | 2.500,- | 1,2 |
| Lemak | 2 | 2.000,- | 3.000,- | 2.000,- | 0,9 |
| Tulang kaki (shank) | 4 batang | 500,- | 750,- | 1.000,- | 0,5 |
| Kepala | 1 buah | 135.000,- | 150.000,- | 15.000,- | 7,0 |
| Kulit | 30 | 6.500,- | 7.500,- | 30.000,- | 14,1 |
| Keuntungan Pengecer | | | | 213.500,- | 100,0 |

Analisis marjin tataniaga dilaksanakan dengan cara pendekatan perhitungan terhadap omset penjualan yang umum berlaku. Analisis pada penelitian ini digunakan omset pedagang/pejagal sapi sebanyak tiga ekor per hari. Sementara itu untuk pengecer menggunakan data biaya operasional yang mempunyai omset penjualan seekor sehari atau sekitar 100 kg daging/hari. Hasil analisis marjin tataniaga tertera pada Tabel 10.

Hasil analisis usaha perdagangan daging sapi memberikan keuntungan dengan nilai RCR masing-masing 1,13 dan 1,12 untuk pedagang/pejagal dan pengecer daging sapi. Walaupun nilai RCR lebih dari satu, nilai tersebut relatif masih kecil dari nilai wajar sekitar 1,20. Namun demikian secara nominal,

keuntungan yang diperoleh setiap hari cukup memadai, yaitu sekitar Rp 265 ribu dan Rp 290 ribu per ekor sapi per hari, masing-masing untuk pedagang/pejagal sapi dan pengecer daging sapi.

Proporsi marjin yang diterima masing-masing pelaku pasar pada satuan waktu yang sama sebesar 76,22% untuk peternak, sebesar 10,10% untuk pedagang/pejagal sapi, sebesar 11,05% untuk pengecer, dan sebesar 2,63% untuk biaya operasional. Berdasarkan sebaran marjin keuntungan dan besarnya biaya tataniaga, maka sistem tataniaga daging sapi di NTB sudah cukup efisien. Hal ini sesuai dengan struktur pasar ternak dan daging sapi di daerah ini yang cenderung bersaing sempurna.

Tabel 10. Analisis marjin tataniaga daging sapi di Kota Mataram, 2000

| (Volume: 3 ekor/hari)* | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|------|
| Pelaku pasar | Uraian kegiatan | Nilai (Rp. 000,-) | Proporsi (%) | RCR |
| Peternak | Penerimaan | 6.000,0 | 76,22 | - |
| Pedagang/ Pejagal sapi | 1. Pengeluaran: | 6.128,8 | - | - |
| | a. Pembelian | 6.000,0 | - | - |
| | b. Transportasi | 22,6 | 0,29 | - |
| | c. Komisi agen | 22,5 | 0,29 | - |
| | d. Tenaga kerja | 55,5 | 0,71 | - |
| | e. Retribusi RPH | 27,0 | 0,34 | - |
| | f. Penyusutan alat | 1,2 | 0,02 | - |
| | 2. Penerimaan: | 6.924,0 | - | 1,13 |
| | a. Penjualan daging | 5.700,0 | - | - |
| | b. Penjualan HGJL** | 324,0 | - | - |
| c. Penjualan bahan lain | 900,0 | - | - | |
| | 3. Keuntungan | 795,2 | 10,10 | - |
| Pengecer daging | 1. Pengeluaran : | 7.002,0 | - | - |
| | a. Pembelian | 6924,0 | - | - |
| | b. Transpor daging | 9,0 | 0,11 | - |
| | c. Tenaga kerja | 15,0 | 0,19 | - |
| | d. Iuran | 4,7 | 0,06 | - |
| | e. Penyusutan | 40,3 | 0,51 | - |
| | f. Packing | 9,0 | 0,11 | - |
| | 2. Penerimaan: | 7.871,7 | - | 1,12 |
| | a. Penjualan daging (susut 2,5%) | 5.920,2 | - | - |
| | b. Penjualan HGJL** | 382,5 | - | - |
| c. Penjualan bahan lain | 1.569,0 | - | - | |
| | 3. Keuntungan | 869,7 | 11,05 | - |
| Konsumen | Pembelian | 7.871,7 | 100,0 | - |

Keterangan : * Setara dengan 300 kg daging murni

** HGJL = Hati, Ginjal, Jantung, dan Limpa

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasar lokal daging sapi di daerah ini masih prospektif untuk dikembangkan. Sementara itu peran NTB di pasar sapi potong nasional cenderung menurun, walaupun sebenarnya pangsaanya cenderung meningkat. Dengan demikian jika kebijakan pembangunan peternakan kurang mendukung, maka diduga peran NTB di pasar nasional akan semakin berkurang.

Beberapa kebijakan yang secara ekonomi bersifat disinsentif, antara lain (1) Pembatasan volume perdagangan sapi ke luar propinsi dengan sistem kuota; (2) Fasilitas transportasi dari NTB ke Surabaya dan dari Surabaya ke Jakarta yang kurang memadai, dan tidak ada jadwal tetap serta makin menurun tingkat layanannya; dan (3) Kebijakan Otonomi Daerah, yang berdampak terhadap meningkatnya kutipan-kutipan pada kegiatan perdagangan sapi luar propinsi.

Sistem tataniaga ternak dan daging sapi di NTB sudah cukup efisien dengan struktur pasar ternak dan daging sapi yang cenderung pada pasar persaingan sempurna. Di samping itu, ada keterkaitan antara pasar sapi lokal dengan pasar luar propinsidengan harga jual untuk perdagangan luar propinsi cenderung meningkatkan harga jual sapi untuk pasar lokal.

Saran-saran

Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging sapi, perlu upaya peningkatan produksi dan produktivitas melalui pola pemeliharaan sapi semi-intensif dan intensif. Upaya tersebut hendaknya diikuti dengan penerapan paket teknologi inseminasi buatan yang memadai.

Sosialisasi perubahan paradigma pembangunan peternakan dari peningkatan populasi menjadi peningkatan produksi dan produktivitas agar terus digalakkan. Sejalan dengan itu, kebijakan kuota sebaiknya dimodifikasi.

Penggunaan fasilitas transportasi laut yang semakin tidak memadai dan tidak teratur cenderung meningkatkan biaya transportasi dan meningkatkan penurunan berat badan ternak. Oleh karena itu larangan sapi potong asal NTB melintasi daratan Bali perlu ditinjau kembali, terutama jika ternak tersebut telah melalui proses karantina dan dinyatakan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- ADNYANA, M.O., K. KARIYASA, NYAK ILHAM, SAKTYANU K.D., dan IKIN SADIKIN. 1997. Prospek dan Kendala Agribisnis Sapi Potong di Indonesia Memasuki Era Globalisasi Ekonomi. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- ANONIMOUS. 2000. Pembangunan Rumah Potong Hewan dan Tataniaga Daging. Laporan Proyek. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Produksi Peternakan Departemen Pertanian bekerjasama dengan PT Cakra Hasta. Jakarta.
- DINAS PETERNAKAN PROPINSI NTB. 1996. Buku Statistik Peternakan 1995. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan. Mataram.
- _____. 1997. Buku Statistik Peternakan 1996. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan. Mataram.
- _____. 1998. Buku Statistik Peternakan 1997. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan. Mataram.
- _____. 1999. Buku Statistik Peternakan 1998. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan. Mataram.
- _____. 2000. Buku Statistik Peternakan 1999. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan. Mataram.
- DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN. 2000. Statistik Peternakan 1999. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian. Jakarta.
- KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROPINSI NTB. 2000. Penyusunan Peta dan Direktory RPH Menurut Klas Kapasitas Potong dan Fasilitas yang Tersedia. Makalah tidak dipublikasi Proyek Pengembangan Agribisnis, Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi NTB. Mataram.
- PURCELL, W.D. 1979. Agricultural Marketing, System, Coordination, Cash and Future Price. Reston, Virginia.
- SOEDJANA, T.D., I.W.RUSASTRA, dan T. SUDARYANTO. 1998. Penawaran, Permintaan dan Konsumsi Pangan Hewani di Indonesia, dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- SAPTANA. 1993. Kajian Aspek Produksi dan Pemasaran Kedelai di Jawa Tengah (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri). Forum Agro Ekonomi Vol.10 No.2 dan Vol.11 No.1: 8-18. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- TOMEK, W.G. and K.L. ROBINSON. 1981. Agricultural Products Prices. Third Edition. Cornell University Press. Ithaca and London.